

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kerangka Teoritis

Akuntansi adalah suatu proses yang sistematis yang bertujuan untuk mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, dan menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Menurut (Warren, Carl S.; Reeve, James M.; Duchac, 2018) “Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.” Definisi ini menegaskan peran utama akuntansi dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi para pengguna laporan keuangan.

Pandangan serupa diungkapkan oleh (Baridwan, 2023), yang menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu teknik atau sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengelola informasi keuangan, dengan tujuan untuk menghasilkan laporan yang relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Fungsi utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang mencakup posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu.

Akuntansi tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang penting bagi pelaku usaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan. Dalam konteks UMKM, praktik akuntansi berperan sebagai fondasi yang krusial dalam pengelolaan arus kas, menentukan harga pokok produksi, serta menilai efisiensi operasional.

Seiring dengan kemajuan zaman, praktik akuntansi tidak lagi terbatas pada perusahaan besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharuskan memiliki kemampuan dalam pencatatan keuangan yang baik agar dapat bertahan dalam persaingan pasar, memenuhi

kebutuhan administrasi perpajakan, serta mendapatkan akses pembiayaan. Oleh karena itu, keberadaan standar khusus seperti SAK EMKM menjadi sangat penting dalam mendukung pelaku usaha mikro untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sangat tepat dan terarah.

Selain berperan dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi juga berfungsi sebagai alat kontrol internal dalam suatu usaha. Dengan adanya sistem akuntansi yang efektif, pemilik usaha dapat mengidentifikasi penyimpangan, kesalahan, serta potensi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakteraturan dalam pencatatan. Menurut (Harahap, 2020), informasi akuntansi yang akurat akan mendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang rasional dan objektif, serta meningkatkan efisiensi operasional usaha.

(Rahma et al., 2025) mengemukakan bahwa pencatatan transaksi yang baik memungkinkan UMKM untuk menyebarkan kinerja keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data aktual dan historis. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya sekedar alat pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol manajemen yang efektif.

Dalam standar pendidikan akuntansi di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pengukuran, pengenalan, pencatatan, dan penyajian informasi ekonomi tersebut harus disusun sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, termasuk SAK EMKM yang ditujukan untuk skala mikro, kecil, dan menengah (IAI, 2016). Standar ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam pencatatan keuangan, tanpa mengurangi kualitas informasi yang diperlukan oleh pemilik usaha maupun pihak eksternal.

Menurut (Rachmawati & Hidayatullah, 2023), Pemahaman akuntansi yang baik mencakup kemampuan untuk memahami transaksi, menyusun laporan keuangan, serta mencatat bukti transaksi dengan akurat.

Dengan demikian, akuntansi dapat dianggap sebagai keahlian strategis yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama bagi pelaku UMKM yang masih melakukan pencatatan secara manual dan tidak terstruktur. Kurangnya pemahaman tentang akuntansi sering kali menjadi kendala bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Penelitian Rahma et al. (2025), ditemukan bahwa ketidakmampuan pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan akuntansi menyebabkan kegagalan dalam mengevaluasi performa bisnis serta ketidakteraturan arus kas. Tanpa laporan keuangan yang jelas, pelaku usaha tidak dapat menilai apakah usahanya mengalami keuntungan atau kerugian. Hal ini berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pendidikan bagi pelaku UMKM menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan.

Kesimpulannya adalah akuntansi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha, termasuk UMKM seperti Apotek Asher. Sebagai proses penyediaan informasi keuangan yang akurat dan relevan, akuntansi membantu pemilik usaha dalam membuat keputusan yang tepat, mengelola keuangan secara efisien, serta membangun kredibilitas usaha. Pemahaman akuntansi yang baik dan penerapan SAK EMKM secara konsisten menjadi pondasi penting dalam tata kelola keuangan yang profesional, terutama dalam menghadapi tantangan usaha di era digital dan kompetitif saat ini.

1.1.1 Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah serangkaian proses berurutan yang digunakan untuk mencatat dan memproses semua transaksi keuangan suatu entitas, mulai dari saat transaksi terjadi hingga penyusunan laporan keuangan di akhir periode. Siklus ini sangat penting karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Kasmir (2014), siklus akuntansi mencakup tahapan, mulai dari pencatatan transaksi keuangan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan. Dalam UMKM, pemahaman tentang siklus ini sangat krusial agar pelaku usaha dapat mengelola keuangannya dengan efisien dan memenuhi kewajiban pelaporan keuangan serta perpajakan.

Siklus akuntansi terdiri dari delapan tahap utama, yaitu :

- 1) Pencatatan transaksi ke dalam bukti transaksi
- 2) Pencatatan ke jurnal umum
- 3) Pemindahan ke buku besar
- 4) Penyusunan neraca saldo
- 5) Penyesuaian akun (jika diperlukan)
- 6) Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian
- 7) Penyusunan laporan keuangan
- 8) Penutupan buku.

Tahap awal dalam siklus akuntansi adalah pencatatan transaksi. Dalam UMKM, tahap ini sering digunakan secara manual tanpa sistematika yang jelas, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data transaksi. Padahal, bukti transaksi seperti faktur, nota pembelian, dan bukti kas keluar/masuk sangat penting untuk validitas informasi keuangan.

Tahap berikutnya adalah jurnal umum, yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis. Menurut Kurniawan dan Rahayu (2022), banyak pelaku UMKM tidak menggunakan jurnal menggunakan jurnal umum karena keterbatasan pemahaman dan alat pencatatan, padahal jurnal ini berfungsi sebagai penghubung antara bukti transaksi dan akun buku besar (Djailani et al., 2022). Setelah itu, transaksi dipindahkan ke dalam buku besar, tempat seluruh akun keuangan disusun dan diklasifikasikan. Buku besar menjadi dasar untuk menyusun neraca saldo, yaitu daftar seluruh saldo akun yang digunakan untuk memeriksa keseimbangan antara total debit dan kredit. Neraca saldo membantu

memastikan bahwa tidak ada kesalahan perhitungan dalam proses pencatatan.

Jika terdapat akun-akun yang perlu disesuaikan, seperti beban dibayar di muka atau penyusutan, maka dilakukan jurnal penyesuaian, yang selanjutnya digunakan untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini, laporan keuangan seperti laba rugi dan neraca dapat disusun. Tahap akhir dalam siklus akuntansi ini adalah penutupan buku. Dimana akun-akun sementara ditutup agar siap digunakan pada periode akuntansi berikutnya.

Dalam UMKM, siklus akuntansi yang sederhana dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh (Rahma et al., 2025), pelaku UMKM dapat memanfaatkan aplikasi akuntansi sederhana berbasis excel untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan tanpa harus menguasai akuntansi secara kompleks.

Penerapan siklus akuntansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas usaha, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan seperti penentuan harga jual, efisiensi biaya, hingga pengajuan pinjaman. Oleh karena itu, siklus akuntansi menjadi fondasi utama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi pelaku usaha mikro seperti Apotek Asher.

1.1.2 Pengertian SAK EMKM

SAK EMKM merupakan Singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu standar yang dirancang secara khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut (IAI, 2016), SAK EMKM adalah standar akuntansi berbasis akural sederhana yang diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, dengan karakteristik kegiatan usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan konsolidasi. Standar ini disusun untuk menyederhanakan pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, sehingga sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan UMKM di Indonesia.

SAK EMKM menjadi alternatif dari SAK Umum dan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), karena standar tersebut sering dianggap terlalu kompleks bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, dalam SAK EMKM, laporan keuangan yang diwajibkan hanya meliputi tiga komponen, yaitu:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan

Hal ini sangat berbeda dengan SAK EMKM yang memiliki persyaratan penyajiannya laporan keuangan yang lebih luas dan rinci. SAK EMKM juga tidak mewajibkan penyusunan laporan arus kas ataupun laporan perubahan ekuitas (IAI, 2016).

Menurut (Sulisti, 2019), SAK EMKM sangat membantu pelaku usaha kecil dalam menyusun laporan keuangan yang berguna untuk menilai kinerja usaha, keperluan pinjaman ke lembaga keuangan, dan memenuhi persyaratan perpajakan. Mereka menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM memberikan struktur dasar yang dapat dipahami oleh pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang akuntansi formal.

Penerapan SAK EMKM juga dinilai sebagai upaya strategis pemerintah dan asosiasi profesi dalam meningkatkan inklusi finansial dan mendorong pertumbuhan UMKM. Hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam penguatan sektor informal agar lebih tertib secara administratif dan siap berkembang ke arah formal. (Rahma et al., 2025) menyebutkan bahwa penerapan standar ini dapat menjadi pijakan awal bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank dan mengikuti kompetisi bisnis yang lebih luas.

Apotek Asher yang menjadi objek penelitian ini, penerapan SAK EMKM sangat relevan mengingat bentuk usaha tersebut termasuk dalam kategori skala kecil, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan publik, dan selama ini masih mengandalkan pencatatan manual yang

belum sepenuhnya sesuai dengan standar. Dengan mengadopsi SAK EMKM, diharapkan Apotek Asher dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya, mengurangi kesalahan dalam pencatatan, serta mendukung keberlanjutan usaha secara berkelanjutan.

1.1.3 Karakteristik SAK EMKM

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) dirancang untuk memberikan panduan akuntansi yang sederhana dan mudah diterapkan oleh entitas yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan akses informasi. Standar ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari standar akuntansi lain seperti SAK Umum dan SAK ETAP.

Menurut (IAI, 2016), karakteristik utama SAK EMKM mencakup:

1) Sederhana dan Mudah Dipahami

SAK EMKM disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM, bahkan oleh mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Penyusunan laporan keuangan difokuskan pada informasi yang paling penting dan relevan untuk operasional usaha skala kecil.

2) Berlaku untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar ini diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik (seperti investor atau pemegang saham publik), serta tidak diperdagangkan di pasar modal.

3) Penyajian Laporan Keuangan yang Sederhana

Laporan keuangan yang diharuskan dalam SAK EMKM hanya terdiri dari tiga komponen:

- a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b) Laporan Laba Rugi
- c) Catatan atas Laporan Keuangan

Tidak diwajibkan menyusun laporan arus kas atau laporan ekuitas sebagaimana dalam SAK Umum.

4) Basis AkruaI Sederhana

Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan basis akrual sederhana, yang artinya pendapatan diakui ketika diterima dan beban diakui ketika terjadi, tanpa memperhitungkan pengakuan dan pengukuran kompleks seperti penilaian nilai wajar atau derivatif.

5) Fleksibilitas dalam Aplikasi dan Teknologi

SAK EMKM memungkinkan penyusunan laporan keuangan secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel. Ini memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha yang belum mengadopsi sistem informasi akuntansi berbasis digital.

6) Penyesuaian dengan Praktik UMKM di Lapangan

Menurut (Rahma et al., 2025), SAK EMKM tidak memaksakan bentuk dan format jurnal atau laporan, tetapi mengarahkan prinsip-prinsip dasarnya sehingga pelaku UMKM tetap bisa menyesuaikan pencatatan dengan kondisi riil usaha, termasuk FIFO dalam pencatatan persediaan barang dagang.

7) Tidak Membutuhkan Auditor Eksternal

Dalam pelaksanaannya, SAK EMKM ini tidak mengharuskan laporan keuangan diaudit oleh auditor publik, meskipun tetap memungkinkan tetap memungkinkan jika dibutuhkan untuk kepentingan pembiayaan atau akreditasi usaha.

8) Menekankan Akuntabilitas dan Transparansi Internal

Walaupun bersifat sederhana, standar ini menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama untuk kebutuhan internal seperti evaluasi usaha, pemantauan arus kas, dan pengendalian biaya.

Dengan karakteristik tersebut, SAK EMKM memiliki keunggulan dalam menjawab kebutuhan akuntansi bagi entitas skala kecil. Standar ini sangat relevan diterapkan pada Apotek Asher yang menjadi objek

penelitian, karena usaha tersebut masih mencatat keuangan secara manual, belum menyusun laporan keuangan sesuai standar, dan dikelola langsung oleh pemilik dengan sumber daya yang terbatas.

1.1.4 Pengertian Persediaan

A. Defenisi Persediaan

Persediaan adalah aset yang dimiliki oleh suatu entitas untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa atau digunakan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, persediaan mencakup barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, barang yang sedang proses produksi untuk tujuan tersebut, atau bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau penyediaan jasa.

Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam laporan posisi keuangan, khususnya bagi entitas yang bergerak di bidang perdagangan, termasuk apotek. Dalam praktik akuntansi, persediaan perlu diakui, diukur, dan disajikan sesuai standar yang berlaku agar informasi keuangan yang disajikan menjadi relevan dan andal

Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 (Revisi 2020) tentang persediaan, persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (Supplies) digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. PSAK 14 menekankan bahwa persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara perolehan dan nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*). Ini penting untuk mencerminkan nilai persediaan yang wajar dan dapat diuangkan secara optimal oleh perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008)

Menurut (Mulyadi, 2023), persediaan merupakan salah satu elemen krusial dalam laporan keuangan karena berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan posisi keuangan akhir. Dalam konteks usaha dagang seperti apotek, persediaan mencakup produk obat-obatan dan

alat kesehatan yang tersedia untuk dijual kepada konsumen. Ketepatan dalam pencatatan persediaan sangat penting, karena kesalahan dalam perhitungan dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam penentuan harga pokok penjualan (HPP) dan laba usaha.

Persediaan diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya. Untuk perusahaan dagang seperti apotek, jenis persediaan utama adalah barang dagangan, yaitu barang jadi yang dibeli untuk dijual kembali tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Pencatatan persediaan harus dilakukan secara sistematis agar informasi mengenai jumlah dan nilai persediaan selalu tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Menurut SAK EMKM, terdapat dua metode pencatatan persediaan yang umum digunakan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Pada metode perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan dicatat secara langsung ke akun persediaan, sehingga saldo persediaan selalu diperbarui. Sementara itu, metode periodik hanya melakukan pencatatan akhir pada periode akuntansi berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan.

Sementara itu, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam modul pelatihan SAK EMKM, untuk entitas usaha kecil, persediaan dapat dicatat dan diukur secara sederhana, yaitu dengan menggunakan harga perolehan dan dinilai kembali jika terdapat penurunan nilai secara signifikan. SAK EMKM menyarankan pendekatan praktis dan mudah dipahami, mengingat keterbatasan sumber daya pelaku UMKM.

Dalam operasional apotek, persediaan mencakup barang-barang seperti obat-obatan alat kesehatan, dan barang dagang lainnya yang dijual kepada konsumen. Penanganan dan pencatatan persediaan yang akurat sangat penting karena menyangkut kesehatan masyarakat serta kelangsungan usaha. Jika pencatatan persediaan tidak dilakukan secara cepat, maka bisa terjadi kelebihan stok, kerusakan barang, atau bahkan kehilangan barang, yang akhirnya akan merugikan usaha.

Dengan demikian, definisi persediaan menurut PSAK dan literatur akuntansi menekankan pada :

- a) Tujuan kepemilikan persediaan (untuk dijual atau dipakai dalam produksi)
- b) Pengukuran yang tepat (biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah)
- c) Sistem pencatatan yang sesuai (perpetual atau periodik)
- d) Dan penilaian yang disesuaikan dengan skala usaha (SAK EMKM untuk UMKM)

Pemahaman ini sangat penting diterapkan di Apotek Asher agar pelaporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan yang wajar, memudahkan pengambilan keputusan dan mendukung kelangsungan usaha secara berkelanjutan

Menurut (Mulyadi, 2023), Persediaan merupakan elemen fundamental dalam pelaporan keuangan karena berpengaruh signifikan terhadap perhitungan laba rugi dan posisi keuangan akhir. Dalam usaha dagang, seperti apotek, mencakup produk obat-obatan dan alat kesehatan yang tersedia untuk dijual kepada konsumen. Ketepatan dalam pencatatan persediaan sangatlah penting, mengingat kesalahan dalam perhitungan dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam penentuan harga pokok penjualan (HPP) dan laba usaha (Sudianto et al., 2022).

Persediaan direkomendasikan berdasarkan jenis usahanya. Untuk perusahaan dagang seperti apotek, jenis persediaan utama adalah barang dagangan, yaitu barang jadi yang dibeli untuk dijual kembali tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Pencatatan persediaan harus dilakukan secara sistematis agar informasi mengenai jumlah dan nilai persediaan selalu tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial (Nur Naningsih, 2019)

Terdapat dua metode pencatatan persediaan yang umum digunakan yaitu, metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik meliputi pencatatan yang dilakukan secara berkala, biasanya pada akhir periode

akuntansi, sedangkan metode perpetual mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan secara langsung ke dalam sistem persediaan. Dalam praktik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk apotek kecil, metode periodik lebih sering digunakan dan diterapkan karena lebih sederhana dan tidak memerlukan sistem komputerisasi yang kompleks (Susanti et al., 2022)

Pengelolaan persediaan yang efektif dapat melindungi entitas usaha dari risiko kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan hamparan dan kegagalan, serta kekurangan persediaan yang berpotensi mengakibatkan hilangnya penjualan. Oleh karena itu, pencatatan yang akurat menjadi fondasi utama dalam pengendalian persediaan. Dalam usaha kesehatan seperti apotek, pengendalian terhadap persediaan juga berkaitan dengan aspek keamanan dan kelayakan produk obat, sehingga pencatatan yang rapi sangat penting. Selain berfungsi sebagai alat pengontrol internal, pencatatan persediaan juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi. Nilai persediaan akhir yang akurat akan menentukan nilai aset dan mempengaruhi hasil laba bersih yang dilaporkan. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi tidak boleh diabaikan dalam praktik akuntansi, bahkan pada usaha mikro atau kecil yang masih bersifat tradisional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah komponen krusial dalam sistem akuntansi usaha dagang, termasuk apotek. Penerapan akuntansi persediaan yang sesuai standar akan memberikan manfaat besar dalam pengambilan keputusan, efisiensi operasional, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

B. Jenis-Jenis Persediaan Dagang

Dalam usaha apotek, persediaan berfungsi sebagai aset utama yang terdiri dari barang dagangan yang dijual kepada konsumen. Jenis-jenis persediaan di apotek lebih kompleks dibandingkan dengan toko kelontong biasa, karena berkaitan langsung dengan produk kesehatan dan tunduk pada regulasi yang ketat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), persediaan apotek mencakup obat resep, obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, serta alat kesehatan dan produk farmasi lainnya yang dijual kepada masyarakat.

Persediaan di apotek dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

- 1) Obat-obatan farmasi, termasuk obat generik dan obat bermerek.
- 2) Alat kesehatan, seperti termometer, tensimeter, dan masker.
- 3) Produk pelengkap, seperti suplemen, vitamin, dan produk perawatan pribadi. Ketiga jenis persediaan ini harus dicatat dan dikelola dengan cara yang berbeda, mengingat masing-masing memiliki masa kadaluarsa, kode batch, dan metode penyimpanan yang spesifik (Yulianti & Hartono, 2021).

Obat-obatan farmasi sebagai komponen utama memiliki karakteristik unik, sering kali dengan masa berlaku yang pendek dan regulasi khusus dalam penyimpanannya. Oleh karena itu, pencatatan yang akurat sangat penting untuk mencegah kerugian akibat kedaluwarsa, kerusakan fisik, atau kesalahan dalam pengelolaan stok. Sistem pencatatan yang baik juga memungkinkan pelacakan jika terjadi penarikan obat (recall) dari pasar.

Alat kesehatan dan produk non-obat, meskipun tidak selalu memiliki masa berlaku yang ketat, tetap perlu dicatat dalam sistem persediaan untuk pengendalian kuantitas, perputaran barang, dan penghitungan laba rugi. Penelitian oleh Rahman dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa pencampuran pencatatan antara produk farmasi

dan non-farmasi sering kali menjadi penyebab ketidakakuratan dalam laporan keuangan apotek.

Secara umum, pengelompokan dan pencatatan jenis-jenis persediaan di apotek dilakukan berdasarkan kategori produk, harga pokok, tanggal masuk, tanggal kedaluwarsa, serta jumlah unit. Klasifikasi ini mempermudah proses penghitungan stok, pengelolaan restok barang, serta penyusunan laporan keuangan. Ketiadaan sistem klasifikasi yang jelas akan menyulitkan identifikasi barang dalam proses pengawasan persediaan (Putri & Haryanto, 2021).

Dalam penerapan SAK EMKM, tidak ada batasan mengenai jenis persediaan yang boleh dicatat, selama barang tersebut merupakan bagian dari kegiatan operasional entitas dan memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset. Oleh karena itu, seluruh jenis persediaan di apotek wajib dicatat sesuai dengan prinsip harga perolehan, dan perubahan nilai harus diakui jika terdapat indikasi penurunan nilai atau kerusakan.

Penting bagi apotek, termasuk Apotek Asher yang menjadi objek penelitian, untuk memiliki daftar klasifikasi barang yang jelas dan rutin diperbarui. Selain untuk kepentingan akuntansi dan pelaporan, hal ini juga mendukung pengawasan oleh instansi kesehatan dan menjaga kualitas pelayanan terhadap pasien dan konsumen. Sistem pencatatan yang sistematis akan memberikan manfaat jangka panjang dalam hal efisiensi usaha dan kepercayaan konsumen.

Persediaan merupakan salah satu aset lancar yang penting dalam operasional suatu entitas, termasuk apotek. Dalam entitas dagang seperti apotek, persediaan tidak hanya mencakup barang untuk dijual kembali, melainkan juga dapat berupa berbagai bentuk barang yang berada pada tahapan yang berbeda dalam siklus operasional, meskipun sebagai besar apotek umumnya hanya menyediakan barang jadi (obat siap jual). Namun secara umum dalam akuntansi, persediaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama yaitu, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.

1) **Bahan Baku (*Raw Materials*)**

Bahan baku adalah komponen utama yang digunakan untuk diproses menjadi barang jadi. Dalam industri manufaktur farmasi, bahan baku biasa berupa zat aktif farmasi (*active pharmaceutical ingredients*) dan eksipien yang digunakan untuk meracik obat. Namun, pada level apotek yang tidak memproduksi sendiri melainkan hanya menjual, kategori ini biasanya tidak digunakan karena apotek menerima produk dalam bentuk sudah jadi dari pabrik atau distributor obat.

2) **Barang dalam Proses (*Work in Process/ WIP*)**

Barang dalam proses adalah produk yang sedang berada dalam tahap pembuatan atau peracikan namun belum selesai. Dalam apotek yang memiliki layanan peracikan resep, barang dalam proses dapat merujuk pada obat-obatan yang sedang diracik oleh apoteker dan belum siap diberikan kepada pasien. Persediaan ini bersifat sementara dan biasanya dicatat secara terpisah jika volume peracikan cukup besar dan berulang.

3) **Barang jadi (*Finished Goods*)**

Barang jadi adalah persediaan yang siap dijual kepada pelanggan. Dalam apotek, barang jadi umumnya terdiri dari obat generik dan paten, suplemen, alat kesehatan ringan, serta produk lain yang telah dikemas dan diberi izin edar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Barang ini merupakan komponen utama dari persediaan apotek menjadi objek utama dalam laporan keuangan.

Menurut PSAK 14 (IAI,2020), persediaan harus diidentifikasi berdasarkan sifat dan penggunaannya dalam proses produksi atau penjualan. Apotek, sebagai entitas dagang dan jasa kesehatan, memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan persediaan, terutama karena sebagian besar terdiri dari **obat-obatan** yang memiliki masa kadaluarsa, ketentuan penyimpanan tertentu (suhu, kelembaban), serta harus dikelola sesuai regulasi.

Lebih lanjut, menurut **Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020)**, **klasifikasi persediaan harus** disesuaikan dengan jenis usaha dan struktur operasionalnya. Dalam bisnis ritel seperti apotek, klasifikasi paling relevan adalah persediaan barang dagang (merchandise inventory) atau barang jadi. Hal ini karena apotek tidak melakukan proses produksi barang, melainkan hanya menjual barang yang telah diproduksi oleh perusahaan farmasi.

Penentuan jenis persediaan ini penting karena akan mempengaruhi cara pencatatan, pengakuan biaya, serta penyajian dalam laporan keuangan. Dalam konteks UMKM seperti Apotek Asher, klasifikasi ini juga akan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan **SAK EMKM**, di mana pendekatan yang digunakan lebih sederhana namun tetap mencerminkan kondisi usaha yang wajar.

C. Fungsi dan Peran Persediaan dalam Operasional Usaha

Persediaan merupakan salah satu elemen penting dalam operasional usaha, khususnya bagi entitas dagang seperti apotek. Persediaan berfungsi tidak hanya sebagai aset lancar yang mendukung kelangsungan kegiatan penjualan, tetapi juga sebagai penentu efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Dalam konteks akuntansi, pengelolaan persediaan yang baik berdampak langsung pada laporan keuangan, arus kas, dan profitabilitas usaha.

Menurut **Heizer & Render (2020)**, persediaan memiliki empat fungsi utama dalam operasi usaha:

- 1) **Menjaga kesinambungan produksi dan penjualan**
- 2) Menjaga stabilitas pelayanan
- 3) Mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan pasokan
- 4) **Memanfaatkan diskon kuantitas dari pemasok.**

Dalam usaha apotek, fungsi-fungsi ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan **obat-obatan yang memadai**, agar pasien atau pelanggan tidak mengalami kekosongan obat yang dibutuhkan. Persediaan obat yang cukup memungkinkan apotek memberikan pelayanan cepat dan tepat, serta mencegah kehilangan pelanggan akibat ketidaktersediaan

barang. Selain itu, menurut **Gitosudarmo dan Mulyono (2019)**, fungsi strategis dari persediaan meliputi:

1. **Penyediaan stok penyangga (*buffer stock*)** untuk mengatasi keterlambatan pasokan dari distributor.
2. **Menjamin kontinuitas usaha** dengan memastikan tidak terjadi kehabisan stok (*stockout*) yang bisa mengganggu alur penjualan.
3. **Mengoptimalkan pembelian** dengan cara melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk menekan biaya per unit.

Sementara itu, dalam kerangka akuntansi, **persediaan juga berperan sebagai indikator efisiensi manajemen operasional dan keuangan perusahaan**. Menurut **Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020)**, nilai persediaan yang tercatat pada laporan posisi keuangan mencerminkan nilai aset yang siap dijual dan memiliki potensi untuk menghasilkan arus kas masuk dalam jangka pendek. Jika tidak dikelola dengan baik, persediaan bisa menimbulkan risiko seperti pemborosan, kadaluarsa, atau penurunan nilai (*write-down*).

Dalam apotek, persediaan obat yang terlalu banyak bisa menimbulkan kerugian akibat kadaluarsa, sementara persediaan yang terlalu sedikit bisa menyebabkan kehilangan penjualan. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan yang seimbang sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dan menjaga profitabilitas usaha.

Dari sudut pandang **SAK EMKM (IAI, 2018)**, persediaan dalam usaha kecil seperti apotek dinilai secara sederhana, tetapi tetap harus mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Fungsi pencatatan persediaan adalah menyediakan informasi yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan, baik oleh pemilik usaha maupun pihak eksternal seperti kreditur dan investor lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persediaan memiliki **fungsi operasional dan strategis**, yakni:

- a. Menjamin ketersediaan produk untuk dijual,

- b. Menstabilkan pelayanan kepada pelanggan,
- c. Mengoptimalkan biaya operasional melalui manajemen stok yang efisien,
- d. Dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dalam laporan akuntansi.

1.1.5 Pencatatan Persediaan Menurut SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana namun andal tetap dapat diandalkan. Dalam SAK EMKM, pengaturan akuntansi persediaan disajikan secara ringkas, namun tetap mematuhi prinsip akuntansi akrual. Menurut (IAI, 2022), persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan dan diakui sebagai beban pada saat barang tersebut dijual atau digunakan, bukan pada saat pembeliannya.

Dalam praktiknya, SAK EMKM tidak mengharuskan entitas mikro untuk menyusun laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas. Fokus utama dari standar ini adalah penyajian laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, pencatatan persediaan menjadi sangat penting untuk mencerminkan nilai aset lancar dan menentukan nilai beban pokok penjualan (BPP) secara akurat dalam laporan laba rugi (IAI, 2022)

Menurut SAK EMKM, persediaan harus diukur berdasarkan harga perolehan, yang mencakup semua biaya pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Apabila terjadi penurunan nilai persediaan akibat kerusakan, keusangan, atau ketidaklakuan, entitas diwajibkan untuk menilai kembali persediaan tersebut ke nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (Chrystabel & Raharja, 2023). Dalam usaha apotek, hal ini berarti setiap pembelian obat harus dicatat berdasarkan harga pembelian aktual, termasuk biaya pengiriman jika ada. Selanjutnya, jika terdapat obat yang kedaluwarsa atau

rusak, nilai persediaan harus disesuaikan sesuai dengan nilai realisasi bersih. Ini bertujuan agar laporan keuangan tidak mencerminkan nilai aset yang terlalu tinggi dan dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya (Kurniawati, 2021).

SAK EMKM juga memungkinkan pencatatan persediaan dilakukan secara manual, sehingga memudahkan pelaku usaha kecil yang belum memiliki sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Namun, pencatatan harus tetap dilakukan secara teratur dan disiplin, misalnya melalui buku persediaan, kartu stok, atau lembar kerja Excel sederhana. Syarat utama adalah informasi harus dapat ditelusuri dan diverifikasi jika diperlukan (Sari & Abdullah, 2020).

Penerapan pencatatan persediaan sesuai dengan SAK EMKM memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro, antara lain kemudahan dalam menyusun laporan keuangan, kemudahan dalam pengajuan pembiayaan usaha, serta dasar yang jelas dalam pelaporan perpajakan. Jika pencatatan tidak dilakukan sesuai dengan prinsip ini, laporan keuangan dapat menjadi tidak valid, yang akan memengaruhi kredibilitas dan kinerja usaha (Susanto, 2022).

Pencatatan persediaan merupakan proses penting dalam akuntansi yang bertujuan untuk mengukur dan mengontrol ketersediaan barang yang dimiliki entitas usaha, baik untuk dijual kembali maupun digunakan dalam operasional. Dalam praktiknya, terdapat beberapa sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, tergantung pada karakteristik dan skala usaha. Apotek, sebagai entitas dagang sekaligus pelayanan kesehatan, perlu menerapkan sistem pencatatan persediaan yang tepat agar dapat menjaga kesinambungan pelayanan kepada pelanggan, efisiensi usaha, serta menyajikan informasi keuangan yang andal.

a. Sistem Pencatatan Persediaan Pertual dan Periodik

Menurut **Warren, Reeve, dan Duchac (2020)**, terdapat dua sistem utama dalam pencatatan persediaan, yaitu **sistem perpetual** dan **sistem periodik**.

- 1) Sistem Perptual, dalam sistem ini, pencatatan persediaan dilakukan secara **terus-menerus (real-time)**. Setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan, jumlah dan nilai persediaan langsung diperbarui dalam pembukuan. Sistem ini memungkinkan pengendalian persediaan yang lebih akurat karena informasi selalu ter-update. Sistem ini cocok digunakan jika entitas memiliki perangkat lunak atau teknologi pendukung.
- 2) **Sistem Periodik**, dalam sistem ini, pencatatan persediaan hanya dilakukan pada **akhir periode akuntansi** melalui penghitungan fisik. Persediaan akhir dihitung secara manual dan nilai HPP

(Harga Pokok Penjualan) ditentukan berdasarkan rumus:

$\text{Persediaan Awal} + \text{Pembelian} - \text{Persediaan Akhir} = \text{HPP}$
--

Sistem ini umum digunakan oleh UMKM karena lebih sederhana dan tidak memerlukan teknologi canggih.

b. Metode Penilaian Persediaan FIFO, LIFO, dan Average

1) FIFO (First-In, First-Out)

Metode ini merupakan barang yang pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu. Cocok digunakan dalam industri yang mengelola barang mudah kedaluwarsa seperti obat. Nilai persediaan akhir cenderung mencerminkan harga pasar yang terbaru.

2) LIFO (Last-In, First-Out)

Metode ini merupakan barang terakhir yang dibeli akan dijual terlebih dahulu. Umumnya tidak digunakan dalam konteks apotek karena dapat menyebabkan persediaan lama tidak terjual (berisiko kedaluwarsa).

3) Average (Rata-Rata Tertimbang)

Metode ini menghitung harga pokok per unit dengan cara membagi total biaya pembelian dengan jumlah unit. Metode ini mudah diterapkan oleh UMKM dan mencerminkan nilai rata-rata yang stabil.

c. Pencatatan Persediaan Berdasarkan SAK EMKM

Dalam **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)** yang diterbitkan oleh IAI (2018), pencatatan persediaan dilakukan dengan prinsip **kesederhanaan**, namun tetap harus dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan.

SAK EMKM menetapkan bahwa:

- **Persediaan diukur sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.**
- Biaya perolehan dapat dihitung menggunakan **metode FIFO atau rata-rata tertimbang**, sedangkan metode LIFO tidak disarankan.
- **Pencatatan persediaan tidak perlu dilakukan secara terus-menerus** (tidak wajib sistem perpetual), sehingga sistem periodik menjadi pendekatan yang umum bagi pelaku UMKM seperti apotek.

Prinsip utama SAK EMKM adalah memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha kecil agar pencatatan dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas informasi akuntansi. Bagi apotek, pencatatan ini penting untuk mengetahui posisi stok obat, menghindari kekosongan obat penting, serta untuk menyusun laporan keuangan yang layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Namun, banyak pelaku UMKM, termasuk apotek kecil, yang belum menerapkan pencatatan persediaan sesuai dengan SAK EMKM karena berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan akuntansi, minimnya tenaga terampil, dan kurangnya bimbingan teknis. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan dalam penerapan SAK EMKM menjadi sangat penting agar praktik akuntansi yang sehat dapat tumbuh dan diterapkan secara luas di sektor mikro dan kecil, termasuk dalam pengelolaan persediaan.

1.1.6 Penerapan SAK EMKM dalam Pencatatan Persediaan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2016 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Tujuan dari SAK EMKM adalah memberikan pedoman akuntansi yang sederhana, praktis, dan sesuai untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah, termasuk sektor perdagangan seperti apotek.

1) Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Persediaan Menurut SAK EMKM

1) Pengakuan Persediaan

Menurut SAK EMKM Bab 9, persediaan diakui sebagai aset pada saat entitas memperoleh kendali atas barang tersebut, yaitu saat barang telah diterima dari pemasok dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Persediaan hanya diakui jika nilai ekonomisnya dapat diukur secara andal dan barang tersebut digunakan untuk dijual atau mendukung kegiatan usaha.

2) Pengukuran Persediaan

SAK EMKM menyatakan bahwa persediaan diukur pada **biaya perolehan** atau **nilai realisasi bersih (NRV)**, **mana yang lebih rendah** (*lower of cost or net realizable value*).

a) **Biaya perolehan** mencakup harga pembelian, ongkos angkut, dan biaya lain yang terkait langsung dengan perolehan persediaan.

b) **Nilai realisasi bersih** adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Metode yang disarankan untuk menghitung biaya persediaan adalah:

1) Metode FIFO (First-In, First-Out)

2) Metode Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Cost)

Metode LIFO tidak digunakan dalam standar ini karena dianggap tidak relevan dengan prinsip konservatif dan tidak mencerminkan nilai pasar terkini.

3) Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan berbasis SAK EMKM, persediaan disajikan sebagai **aset lancar** di neraca dan digunakan untuk menghitung laba rugi, khususnya dalam perhitungan **Harga Pokok Penjualan (HPP)**. Jika terdapat penurunan nilai (misalnya karena kedaluwarsa, kerusakan, atau permintaan yang menurun), maka selisih antara nilai buku dan nilai realisasi bersih diakui sebagai **beban penurunan nilai persediaan**.

2) Praktik Umum yang Diterapkan oleh UMKM (Termasuk Apotek)

Dalam praktiknya, pelaku UMKM seperti apotek lebih cenderung menggunakan **sistem periodik** untuk mencatat persediaan, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.

Praktik umum yang sering dilakukan antara lain:

- a) Melakukan pencatatan secara manual di buku persediaan atau Excel sederhana.
- b) Menghitung persediaan secara fisik pada akhir periode (bulanan atau tahunan).
- c) Menggunakan metode rata-rata sederhana untuk menilai persediaan akhir.
- d) Tidak memisahkan antara persediaan yang rusak atau kedaluwarsa dari persediaan yang masih layak jual.

- e) Tidak selalu melakukan penyesuaian terhadap penurunan nilai persediaan (tidak menghitung NRV secara rutin).

Meskipun tidak selalu ideal, pendekatan ini cukup umum karena SAK EMKM memberi keleluasaan dan kesederhanaan agar dapat diterapkan oleh pelaku usaha dengan pemahaman akuntansi terbatas.

3) Permasalahan Umum dalam Implementasi SAK EMKM pada Pencatatan Persediaan

Beberapa kendala yang umum dihadapi oleh UMKM, khususnya apotek, dalam menerapkan pencatatan persediaan berdasarkan SAK EMKM antara lain:

- 1) **Kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi**
Banyak pelaku UMKM tidak memahami isi dan penerapan dari SAK EMKM, terutama dalam hal pengukuran dan penilaian persediaan.
- 2) **Keterbatasan sumber daya**
Tidak semua apotek memiliki staf akuntansi yang kompeten. Bahkan pencatatan sering kali dilakukan oleh pemilik secara langsung tanpa latar belakang akuntansi.
- 3) **Minimnya penggunaan teknologi**
Banyak apotek kecil belum menggunakan software akuntansi yang mendukung pencatatan persediaan secara otomatis, sehingga rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan pencatatan.
- 4) **Tidak melakukan penyesuaian nilai realisasi bersih**
Akibat keterbatasan informasi dan kontrol stok, penurunan nilai persediaan (misalnya karena kedaluwarsa obat) sering tidak dicatat dalam laporan keuangan.
- 5) **Tidak dilakukan penghitungan HPP yang akurat**

Tanpa pencatatan terperinci, banyak apotek hanya memperkirakan laba berdasarkan selisih kas masuk dan keluar, bukan dari pendekatan akuntansi yang benar.

Permasalahan ini menegaskan perlunya pembinaan dan pendampingan bagi UMKM untuk menerapkan SAK EMKM secara tepat, agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan akuntabel.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan yang krusial dalam membangun argumentasi ilmiah dan memperkuat kerangka konseptual suatu kajian. Dengan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memahami perkembangan kajian dalam bidang tertentu, mengidentifikasi celah penelitian (research gap), serta memperkuat landasan teoritis yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada penerapan SAK EMKM dalam pencatatan persediaan di apotek, terdapat beberapa studi yang menjadi referensi penting.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi SAK EMKM di kalangan usaha mikro dan kecil, khususnya terkait dengan aspek pencatatan keuangan dan pengelolaan persediaan. Temuan dari studi-studi tersebut umumnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM menunjukkan antusiasme dalam menerapkan akuntansi berbasis standar, meskipun mereka masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman teknis yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem pencatatan yang memadai.

N O	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan & Hasil Penelitian
1	Susanti & Prasetyo (2021)	Implementasi SAK EMKM pada Usaha Mikro di Bidang Perdagangan Barang Konsumsi	Pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami isi dari SAK

N O	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan & Hasil Penelitian
			EMKM, terutama terkait dengan pencatatan persediaan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pelatihan mengenai akuntansi sederhana yang berbasis pada standar.
2	Rahmadani & Zulfikar (2022)	Efektivitas Pencatatan Stok Obat Berdasarkan Prinsip Akuntansi Sederhana pada Apotek Kecil di Kabupaten Jember	Pencatatan persediaan obat yang masih dilakukan secara manual dan tidak terorganisir menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta menyulitkan dalam menentukan jumlah stok yang sebenarnya.
3	Putri & Hidayat (2020)	Penerapan Akuntansi UMKM Berdasarkan SAK EMKM di Toko Obat Tradisional	SAK EMKM memberikan dukungan kepada toko

N O	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan & Hasil Penelitian
			obat dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, namun, proses adaptasi tersebut memerlukan pemahaman dasar serta disiplin dalam pencatatan.
4	Chrystabel & Raharja (2023)	Analisis Penerapan SAK EMKM dalam Mengelola Persediaan pada UMKM Bidang Farmasi di Jakarta	Pencatatan persediaan berdasarkan harga perolehan dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan, namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan ketiadaan sistem digital.
5	Hutasoit (2020)	Tingkat Kepatuhan UMKM di Sumatera Utara terhadap SAK EMKM	Meskipun SAK EMKM dirancang secara sederhana, pelaku UMKM masih

N O	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan & Hasil Penelitian
			mengalami kesulitan dalam penerapannya akibat minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis di wilayah tersebut.

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

Melalui penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun SAK EMKM dirancang dengan sederhana untuk mendukung pelaku UMKM, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi dalam praktiknya. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan praktik yang sesuai konteks agar standar ini dapat diimplementasikan secara efektif, terutama dalam pengelolaan persediaan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena berfokus pada satu unit usaha mikro yang spesifik, yaitu Apotek Asher di Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat luas atau berlokasi di daerah perkotaan, penelitian ini menawarkan analisis kontekstual di wilayah pedesaan yang masih jarang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta masukan praktis bagi pelaku usaha kecil lainnya dalam menerapkan akuntansi secara sederhana namun tetap sesuai dengan prinsip yang berlaku.

1.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau representasi yang menggambarkan konsep-konsep yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir merupakan rumusan masalah yang disusun berdasarkan proses deduktif, yang menghasilkan berbagai konsep dan proposisi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian mereka (Firdaus et al., 2021)

Penelitian ini dilakukan karena sebagai salah satu entitas usaha di bidang kesehatan berskala kecil, memiliki kewajiban untuk mengelola dan mencatat persediaan secara akurat. Persediaan obat merupakan aset penting yang memiliki nilai material cukup besar, sehingga kesalahan pencatatan dapat berdampak pada ketepatan laporan keuangan maupun efektivitas pengendalian stok.

Berdasarkan hasil observasi awal, pencatatan persediaan di Apotek Asher masih dilakukan secara sederhana menggunakan buku kas dan kartu stok obat. Buku kas berisi kolom tanggal, keterangan, debet, kredit, dan saldo, namun ditemukan adanya kesalahan perhitungan saldo. Sementara itu, kartu stok obat hanya mencatat jumlah masuk dan keluar tanpa mencantumkan harga pokok produk, sehingga nilai persediaan tidak dapat dihitung secara akurat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pencatatan yang dilakukan dengan prinsip akuntansi yang seharusnya diterapkan.

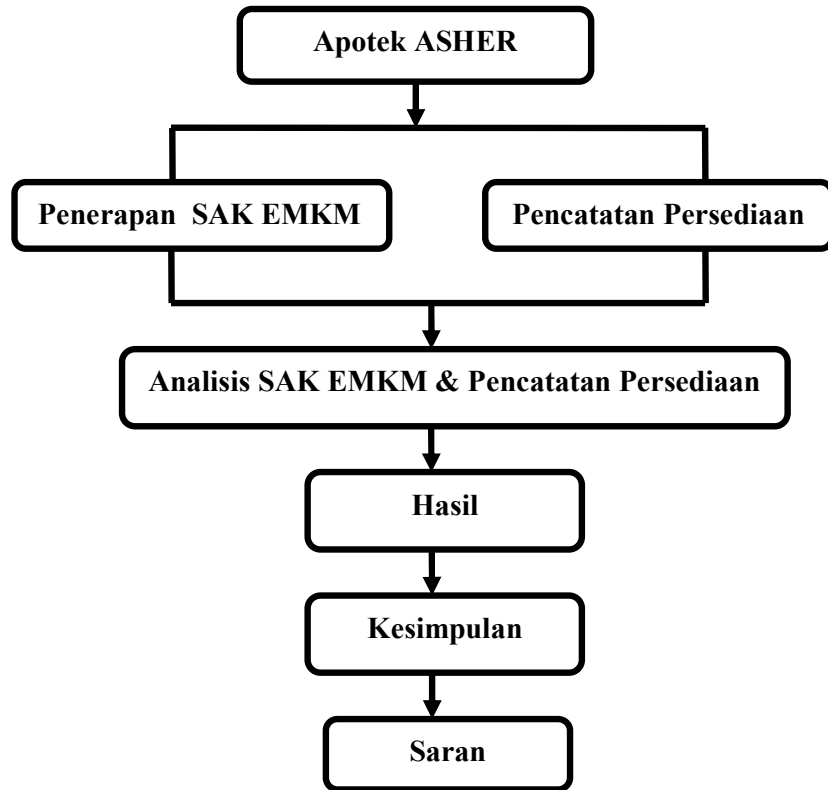
Melalui analisis terhadap kondisi tersebut, ditemukan beberapa kelemahan utama, seperti ketiadaan metode penilaian persediaan yang jelas, kurangnya pencatatan nilai perolehan pada kartu stok, dan lemahnya pengendalian internal atas pencatatan transaksi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai pedoman pencatatan yang sesuai untuk skala usaha seperti Apotek Asher.

SAK EMKM mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan dengan cara yang sederhana namun tetap memenuhi kaidah akuntansi yang berlaku. Dengan penerapan SAK EMKM, sistem pencatatan persediaan dapat diperbaiki melalui penambahan kolom harga pokok pada kartu stok, penerapan

metode penilaian persediaan seperti FIFO, perhitungan harga pokok penjualan (HPP), dan pembenahan format serta perhitungan saldo buku kas.

Selanjutnya, rancangan sistem pencatatan yang baru diuji kesesuaiannya dengan ketentuan SAK EMKM untuk memastikan semua aspek standar telah terpenuhi. Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat menghasilkan laporan persediaan dan HPP yang lebih akurat, memperbaiki akurasi saldo kas, dan mempermudah penyusunan laporan keuangan sederhana yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial serta memenuhi kewajiban pelaporan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk membantu Apotek Asher meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mencapai kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mendukung pengelolaan usaha yang lebih profesional dan akuntabel.

Sumber : Kerangka Berpikir diolah oleh penulis



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir